

ORANG CINA DI INDONESIA DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL

Hari Poerwanto*

Akhir-akhir ini, berbagai konflik yang berdimensi kesuku-bangsaan merupakan fenomena umum di banyak negara, baik yang menuntut otonomi lebih luas maupun berupa gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan diri dari 'negara induknya' (Horowitz, 1985:3). Ada kalanya konflik tersebut bersifat latent dan eksplosif. Peristiwa runtuhnya negara Uni Soviet, konflik berkepanjangan di bekas negara Yugoslavia, pertentangan antara orang Tamil dan Sinhala di Srilangka, dan sebagainya, merupakan contoh gerakan tersebut yang sekaligus merupakan fenomena yang menandai berakhirnya abad XX, termasuk berbagai konflik kesuku-bangsaan yang terjadi di Indonesia seperti peristiwa Sampit, Ambon, Poso, termasuk 'kerusuhan anti Cina'.

Munculnya berbagai gerakan tersebut ada kalanya dipandang sebagai indikasi bahwa proses mewujudkan sebuah negara kesatuan yang lebih besar, telah mengalami hambatan atau kegagalan. Melemahnya semangat integrasi yang disertai oleh menguatnya loyalitas dan solidaritas kesuku-bangsaan yang berdimensi politik dan etnisitas, tidak jarang dapat menggiring suatu bangsa yang majemuk ke dalam sikap bermusuhan di kalangan mereka. Akhirnya, kese-

muanya itu akan bermuara kepada disintegrasinya suatu negara kebangsaan, dengan tuntutan pembagian wilayah sehingga memungkinkan munculnya negara baru yang lebih homogen.

Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku-bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar pada ribuan pulau dengan berbagai macam bentuk budaya dan pengalaman hidupnya. Untuk menuju suatu integrasi nasional Indonesia yang kokoh, ada sejumlah masalah yang

*) Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM.

harus diperhatikan. Dalam tulisannya mengenai heterogenitas politik suku-bangsa di Indonesia, William Liddle (1970) mengidentifikasi ada dua jenis penghalang dalam integrasi nasional. Pertama, ialah yang berakar pada dimensi pembelahan horizontal, yaitu perbedaan suku-bangsa, ras, agama dan geografis. Kedua, pembelahan pada tingkat vertikal berupa perbedaan latar belakang pendidikan elite kota yang berpendidikan, dan massa pedesaan yang berpandangan tradisional.

Guna mempersatukan penduduk Indonesia yang bersifat majemuk, Koentjaraningrat (1982) melihat ada empat masalah pokok yang dihadapi, ialah (1) masalah mempersatukan aneka-warna suku-bangsa, (2) masalah hubungan antarumat beragama, (3) masalah hubungan mayoritas-minoritas, dan (4) masalah integrasi kebudayaan di Irian Jaya dengan kebudayaan Indonesia. Oleh karenanya, sifat majemuk dari bangsa Indonesia, di samping merupakan kebanggaan, hendaknya juga memperhatikan berbagai potensi konflik yang ada.

Penduduk wilayah RI yang 'Bhinneka Tunggal Ika', berbeda fisik dan kebudayaannya. Sebelum kemerdekaan, 'nasion Indonesia' belum terbentuk, yang ada adalah 'nasion lama' dengan

kesatuan solidaritas dan kebudayaannya masing-masing. Selain itu, di kalangan bangsa ini terdiri pula dari golongan keturunan asing yang tidak memiliki wilayah di Nusantara dengan identitas dan kebudayaannya yang berbeda dengan yang dimiliki oleh aneka-warna suku-bangsa. Dengan demikian, arti yang terkandung dalam keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, juga mengandung pengertian derajat perbedaan yang sangat ekstrim dalam arti demikian jauhnya perbedaan antara kebudayaan dari satu suku-bangsa ke suku bangsa lain, di antara mereka yang tinggal jauh di daerah pedalaman sampai dengan mereka yang menghuni ibukota negara, dari budaya masyarakat elit di kota besar dengan budaya yang ultra modern sampai dengan mereka yang menghuni berbagai kawasan pedalaman yang masih kental atau serba diliputi mitos-mitos dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk itu perlu kesadaran akan keanekaragaman yang diwujudkan bukan hanya dalam bentuk slogan. Ketidadasaran heterogenitas akan merupakan benih konflik yang pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasinya sebuah bangsa. Karena itu, idiom 'persatuan, kesatuan dan stabilitas', hendak-

nya tidak selalu menjadi tujuan semata melainkan harus pula dicermati sebagai suatu proses. Apabila hal itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidaknyamanan suku-suku bangsa dan golongan tertentu, yang pada gilirannya akan menyebabkan munculnya sikap tertutup atau bahkan *rigid* terhadap berbagai perubahan yang muncul. Berbagai keresahan dan konflik atau bahkan suatu gerakan separatisme adalah cerminan dari kegelisahan tadi.

Orang Cina dan Masalah Kesuku-bangsaan

Ada kecenderungan bahwa setiap orang akan mengidentifikasi dirinya dengan suku-bangsa tertentu sementara itu pihak lain juga sering mengidentifikasi bahwa perilaku seseorang adalah terkait dengan latar belakang kesuku-bangsanya. Lebih lanjut juga perlu disadari bahwa kenyataannya dalam suatu interaksi sosial berbagai suku-bangsa tadi tidak selalu berada pada suatu posisi yang sama. Ada suku-suku bangsa yang menduduki suatu posisi sebagai kelompok superordinat, sebaliknya ada pula suku-bangsa yang berada pada kelompok subordinat. Ada kalanya, kelompok superordinat juga merupakan kelompok do-

minan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa (*privileges*) tertentu.

Para ahli antropologi seperti Mitchell (1956), Epstein (1958), Gluckman (1961) dan Barth (1969), seringkali mengkaitkan masalah kesuku-bangsaan atau etnisitas dengan perbedaan latar belakang kebudayaan dari suatu kolektiva tertentu, terutama yang menunjuk pada aspek mendasar yang bersifat *primordial sentiment* atau perasaan yang bersifat primordial yang dimiliki seseorang sejak lahir atau karena kelahirannya. Dalam salah satu tulisannya, C.Geertz (1965) menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan *primordial attachment*, yaitu rasa keterikatan terhadap golongan tertentu, misalnya karena ras, hubungan darah, bahasa, adat-istiadat dan agama. Berbagai bentuk keterikatan tersebut antara lain ditempatkan sebagai *sub national cultural value*. Karenanya ekspresi kesuku-bangsaan dalam konteks sebuah *nation state* sekaligus dianggap sebagai cerminan revivalisme identitas di tengah-tengah keanekaragaman suku-bangsa. Karenanya, dalam suatu interaksi sosial aspek '*primordial affinities and attachments*' perlu dicermati agar tidak menghambat pengembangan budaya politik.

Untuk membangun sebuah bangsa yang modern, maka sebuah negara yang bersifat majemuk harus memperhatikan tiga masalah pokok yang seringkali diacu dalam studi etnisitas (Horowitz, 1985). Pertama, adalah masalah garis pembatas suku-bangsa di masa lalu yang masih potensial bagi munculnya sebuah konflik, misalnya religi, bahasa, dan afiliasi politik. Kedua, apa dan bagaimanakah bentuk-bentuk konflik baru di kalangan mereka, termasuk konflik di kalangan suku-bangsa 'mayoritas' dan 'minoritas'. Apakah mereka saling bertikai karena kebutuhan akan penghargaan (*prestige*), perhormatan (*respect*), hak-hak sebagai warganegara (*civil rights*), kekuasaan politik (*political power*), ataukah berkaitan dengan kesempatan mendapatkan akses di sektor perekonomian (*access to economic opportunity*). Ketiga, studi tentang etnisitas tidak hanya sekedar dikaitkan dengan masalah mengejar kesempatan semata, melainkan harus pula dikaitkan dengan suatu ideologi dan kepentingan tertentu.

Untuk lebih memahami posisi sebuah kelompok dalam suatu masyarakat yang majemuk, Schermerhorn (1970:13) memberikan contoh model paradigma, seperti terlihat dalam halaman berikut.

Model paradigma di atas dapat dipakai sebagai pengetahuan untuk memahami berbagai bentuk-bentuk hubungan dalam suatu masyarakat majemuk. Di Indonesia misalnya, di samping terdapat berbagai suku-bangsa yang memiliki suatu wilayah tertentu di Nusantara, terdapat pula kolektiva yang diklasifikasikan sebagai 'golongan minoritas', yaitu Cina, India dan Arab. Khusus untuk orang Cina, seringkali terdapat salah pengertian karena mereka ditempatkan sebagai golongan minoritas. Baik dilihat dari jumlah maupun kekuasaan (ekonomi) yang mereka miliki, adalah kurang tepat apabila mereka berada pada posisi minoritas. Untuk memahami mereka, terutama yang terkait dengan masalah integrasi nasional di Indonesia, seharusnya mereka tidak ditempatkan pada posisi tersebut.

Identifikasi dan Klasifikasi Diri Orang Cina di Indonesia

Kehadiran mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan yang harus diterima, sementara itu memang ada permasalahan yang menyangkut mereka. Untuk itu perlu memahami serangkaian masalah yang melingkarnya permasalahananya dapat

Paradigma Kelompok Dominan dan Subordinat

| Kelompok Dominan | | | |
|----------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| | Jumlah | Kekuasaan | |
| Kelompok A | + | + | Golongan mayoritas Elite |
| Kelompok B | - | + | |
| Kelompok Subordinat | | | |
| | Jumlah | Kekuasaan | |
| Kelompok C | + | - | Subyek massa |
| Kelompok D | - | - | Golongan minoritas |

dimulai dari upaya klasifikasi diri apakah seseorang itu termasuk sebagai orang Cina atau bukan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengklasifikasikan seseorang di Indonesia sebagai orang Cina, merupakan sesuatu yang amat sukar (Skinner, 1963:67; Suryadinata, 1986: 2); dan sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa hal itu bukan sesuatu yang sulit. Willmott (1961:15) berpendapat bahwa tidak ada sedikit keraguan pun dalam mengklasifikasikan seseorang itu apakah termasuk sebagai orang Cina. Sebelum Perang Dunia II, sebagian besar laki-laki Cina di Indonesia telah melakukan perkawinan dengan wanita bumiputera. Anak-anak dari hasil perkawinan campuran tersebut, hampir dapat dipastikan menjadi orang Cina. Keturunan mereka memiliki nama Cina dan lebih terasimilasi serta terakulturasi ke dalam keluarga Cina. Sementara itu Leo Surya-

dinata menilai bahwa masalah mengklasifikasikan apakah seseorang itu termasuk orang Cina atau sebaliknya adalah lebih terkait pada identifikasi diri atau identifikasi sosial, dan bukan didasarkan atas kriteria status kewarganegaraan, latar belakang budaya maupun ras.

Banyak di antara orang Cina-Indonesia adalah berasal dari keturunan dari orang tua atau generasi di atas yang telah melakukan 'perkawinan campuran'. Di antara keturunan mereka itu, sebagian besar tidak dapat dapat menulis dan membaca aksara Cina, serta tidak dapat berbahasa Cina (Weldon, 1974; Poerwanto, 1973,1990; Wilmott, 1960).

Sebenarnya, ada cukup banyak istilah yang dipakai untuk menyebut orang Cina yang bertempat tinggal di Asia Tenggara, termasuk pula yang berada di Indonesia. Di masa lalu, sebutan yang dikenal bagi peran-

tauan orang Cina adalah orang Cina *Nanyang*. Biasanya, istilah *Nanyang* atau *Nan Yang* yang berarti Lautan Selatan dipakai untuk menyebut kawasan atau negara yang terletak di Semenanjung Indo China (Vietnam, Laos dan Kamboja), Semenanjung Melayu dan Indonesia. Secara geografis, berbagai kawasan atau negara tersebut terletak di sebelah selatan dari RRC. Akan tetapi pada masa pemerintahan Dinasti Qing (1644-1911 M), istilah *Nanyang* juga dipergunakan bagi orang-orang Cina yang bertempat tinggal di daerah kawasan pantai Propinsi Jiangsu, Zhejiang, Fujien dan Guangdong (Chang, 1954). Pada akhir tahun enam puluhan, yaitu tatkala banyak orang Cina di Indonesia pulang ke negeri leluhur sebagai akibat PP 10 Tahun 1959, dikenal pula istilah *Huakiau* atau *Hua Qiao* yang sering diterjemahkan dengan orang Cina perantauan (*Overseas Chinese*).

Setelah berlangsungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, adalah suatu kenyataan bahwa di Asia Tenggara termasuk Indonesia terdapat orang-orang keturunan Cina yang memiliki status kewarganegaraan negeri setempat. Setelah ditandatangani Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara pemerintah RI-RRC, berarti status

kewarganegaraan Indonesia di kalangan keturunan Cina adalah sah menurut undang-undang kewarganegaraan RI maupun RRC. Mengingat hal tersebut maka Wang Gungwu (1981:251) pernah mengusulkan dipergunakan istilah *Yinhua* bagi orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, atau *Mahua* bagi yang memiliki status warganegara Malaysia dan *Feihua* yang memiliki status kewarganegaraan Philipina. Istilah *Yinhua* adalah kependekan dari kata *Yindunxiya* (istilah formal dalam *Hayupinyin* bahasa *Hua Yu* atau Mandarin untuk menyebut Indonesia) dan *Hua* (atau *Hua ren*, istilah formal untuk menyebut semua orang Cina di RRC dalam *Hayupinyin*).

Dalam salah satu tulisannya, Lie Tek Tjeng (1971:11), pernah mengusulkan agar orang Cina di Indonesia dibedakan antara mereka yang disebut dengan *Hua-i* (keturunan orang Cina yang tidak mempunyai konotasi kewarganegaraan RRC) dan *Huakiau* (bagi mereka yang mempunyai konotasi warganegara RRC maupun Taiwan). Dalam *The Chinese-English Dictionary* (1979: 288), arti yang diberikan pada kata *Huayi* adalah *foreign citizen of Chinese origins* sedangkan *Huakiao* adalah *overseas Chinese*. Akan tetapi Wang Gungwu kurang setuju apabila istilah

Huaqiao diterjemahkan sebagai *overseas Chinese*. Dalam istilah *Huaqiao* terkandung pengertian luas, bukan hanya sekedar menunjuk tempat tinggal mereka semata melainkan memiliki konotasi arti yang berkaitan dengan solidaritas yang ada di kalangan mereka. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, agaknya memang eksistensi 'ke-Cinaan' seseorang, bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Setiap ada upaya mengganti suatu istilah yang lazim dipakai untuk menyebutkan identitas diri mereka, akan mengundang polemik seperti yang terjadi tatkala digantikannya istilah Tionghoa menjadi Cina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi Republik Rakyat Cina (RRC). Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 yang berakibat pula terputusnya hubungan diplomatik RI-RRC, juga diikuti oleh penggantian istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina. Penggantian istilah tersebut dinilai oleh Lie Tek Tjeng (1971: 10-19) dan Leo Suryadinata (1978:113) bernada menghina dan merendahkan, baik bagi kalangan pemerintah RRC maupun warganegara Indonesia keturunan Cina. Menurut Lie, istilah Cina diambil dari nama Dinasti Ch'in atau Qin yang untuk pertama kalinya berhasil mendirikan negara kesatuan

dengan mempersatukan berbagai negara kecil. Di mata orang Han, Dinasti Qin adalah dinasti orang Manchu yang dianggap sebagai penjajah.

Jika disimak lebih lanjut, ada pula di antara warganegara Indonesia keturunan Cina yang melihat bahwa pemakaian istilah tadi tidak mengandung konotasi seperti yang diutarakan Lie dan Leo. Ong Hok Ham dalam kata pengantar dari buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata (1984) misalnya, demikian pula Puspa Vasanty (1970), tetap memakai istilah Cina. Demikian pula halnya dengan masyarakat Cina di Kalimantan Barat, khususnya di Singkawang, tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Cin atau dengan istilah lain *Tong nyin*, atau orang dari Dinasti Qin atau orang dari Dinasti Tang yang tidak lain juga dinasti orang Manchu yang berkuasa di negeri Cina pada 618-907 M. Selain itu, dalam bahasa Inggris, istilah yang lazim adalah *Chinese*, sedangkan negara mereka dikenal dengan *The People Republic of China* (RRC) dan *Republic of China* (Taiwan).

Untuk lebih memahami persoalan di atas, maka perlu pula diperhatikan berbagai latar belakang yang melingkarinya. Leo Suryadinata sendiri misalnya mengatakan bahwa sampai dengan akhir abad XIX, istilah

standard di Hindia Belanda untuk menyebut mereka adalah dengan kata Cina. Menurut Leo, istilah Cina adalah dari bahasa Melayu sedangkan Lie Tek Tjeng melihatnya bahwa istilah tersebut merupakan *verbastering* (perubahan kata dari susunan standardnya) dari istilah kata Ch'in, yaitu nama dinasti orang Manchu. Pemakaian istilah Tionghoa di kalangan orang Cina di Hindia Belanda baru dimulai pada awal abad XX, yaitu tatkala di Batavia didirikan organisasi *Tiong Hoa Hwe Koan* atau THHK (Suryadinata, 1978: 114). Menurutnya, istilah *Chung-hua* adalah sinonim *Chung Kuo* dan erat kaitannya dengan kebangkitan nasionalisme Cina yang muncul pada akhir abad XVIII. Dalam lafal bahasa Indonesia, istilah *Chung-hua* berubah menjadi Tionghoa, sedangkan *Chung Kuo* berubah menjadi Tiongkok yang dalam bahasa *Hua-yu* maupun Hokkian berarti *middle kingdom*.

Dalam perkembangannya, tatkala itu perubahan pemakaian istilah Cina menjadi Tionghoa dan Tiongkok, tidak segera dapat diserap, baik oleh orang Melayu maupun oleh orang-orang Cina di Hindia Belanda. Dalam laporan yang dibuat oleh THHK pada 1902, masih sering dipergunakan istilah 'bangsa Cina', 'sekolah Cina', 'surat

Cina' dan sebagainya. Istilah Tionghoa menjadi populer di kalangan orang Cina *peranakan* seiring dengan bangkitnya semangat nasionalisme Cina mereka. Oleh karena itu, pemakaian istilah *Chung-hua* merupakan manifestasi kongkrit dari solidaritas mereka terhadap nasionalisme yang mengumandangkan agar orang-orang Cina di perantauan lebih berorientasi kepada negeri Cina.

Seperti halnya di kalangan orang Cina *peranakan*, penggantian istilah Tionghoa dan Tiongkok di kalangan orang Belanda juga berjalan lambat. Secara formal, kedua istilah tersebut baru dipergunakan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada 1928. Dipergunakannya kedua istilah tersebut adalah berkat usaha yang dilakukan orang-orang Cina, terutama dalam kaitannya agar status mereka disamakan dengan golongan Eropa.

Masa kolonialisme di Indonesia telah berlalu, dan dalam perjalanan sejarah terbukti bahwa sebagian besar keturunan orang Cina lebih memilih tetap tinggal di Indonesia dan menjadi warganegara di negeri ini daripada menjadi warganegara RRC maupun Taiwan. Baik fisik maupun kebudayaan, sebenarnya mereka ini adalah berbeda dengan mereka yang sekarang

bertempat tinggal di RRC maupun dengan sesama keturunan perantau orang Cina yang bertempat tinggal di berbagai negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, mereka ini sebenarnya bukan orang *Chung-hua* (*Zhong-hua*) atau Tionghoa yang secara politis berstatuskan warganegara *Chung Kuo* (*Zhong-guo*) atau Tiongkok, melainkan keturunan orang *Zhong-hua* yang berstatuskan warganegara Indonesia. Mereka yang telah berstatuskan warganegara Indonesia adalah kurang tepat jika harus diidentifikasi dan mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok *peranakan*, yaitu sebagai lawan *totok* karena berstatuskan warganegara asing. Sebenarnya, usaha untuk menarik garis pemisah antara *peranakan* dan *totok* adalah kurang tepat jika hanya dikaitkan dengan status kewarganegaraan mereka tanpa melihat latar belaka kebudayaan yang dimilikinya. Ong Hok Ham (1983:52) bahkan berpendapat bahwa pada dasarnya orang Cina di Indonesia, mewarisi unsur *peranakan* maupun *totok*. Dengan kata lain, mereka itu termasuk keturunan Cina yang secara budaya berpola lokal dan Cina. Oleh karena itu, perbedaan antara *peranakan* dan *totok* adalah lebih merupakan perbedaan kelas dalam suatu masyarakat imigran. Pada dewasa

ini tidak satupun keluarga Cina di Jawa yang dapat menelusuri asal-usul keluarganya lebih awal dari abad XVIII. Andaikata di antara mereka ada yang mampu menelusuri asal-usul keluarganya, hanya sedikit saja yang dapat melakukannya dan biasanya hanya mampu sampai dengan batas pertengahan abad ke XIX. Sementara itu, akhir abad XVIII merupakan periode penting dalam perkembangan orang Cina di Jawa. Mulai saat itu, orang-orang Cina di Jawa cenderung melakukan perkawinan dengan sesama orang Cina karena jumlah mereka semakin banyak.

Mengingat berbagai hal tersebut di atas, kiranya usulan Wang Gungwu (1981) merupakan alternatif istilah yang tepat untuk menggantikan kata Cina yang dirasa bernada merendahkan oleh sementara orang Cina-Indonesia. Jelas dalam hal ini, baik istilah (keturunan) orang Tionghoa adalah tidak tepat jika tetap dipakai karena mereka itu secara formal telah berstatuskan warganegara Indonesia dan bukan warganegara RRC atau Taiwan (*stateless*). Kiranya, istilah *Yinhua* dapat pula menjembatani sebutan bagi keanekaragaman suku-bangsa di kalangan orang Cina di Indonesia. Dalam kenyataan, mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Cina

di Indonesia adalah terdiri dari berbagai suku-bangsa yang berbeda, antara lain ada orang Khek (Gek), Hokkian, Teochiu, Kanton, Hainan dan sebagainya. Berbagai suku-bangsa tersebut berasal dari negeri Cina, dan mereka sekarang telah memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia. Adalah cukup beralasan dan layak jika mereka disebut dengan orang *Yinhua* atau orang 'Cina-Indonesia', yang berbeda dengan *Hua ren* (yang berada di RRC), berbeda pula dengan *Mahua* (yang berkewarganegaraan Malaysia), *Feihua* (yang berkewarganegaraan Filipina), dan sebagainya. Identifikasi diri orang *Yinhua* adalah Indonesia dengan tidak menutup kemungkinan bahwa budaya mereka berpola Cina dan lokal.

Dalam penilaian Wang Gungwu (1981:261-264), Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki kompleksitas masalah Cina. Salah satu dari kompleksitas masalah tersebut adalah erat kaitannya dengan hal identifikasi diri mereka dengan negara tempat tinggalnya. Karenanya timbullah masalah yang berkaitan dengan identitas diri seperti yang dikemukakan oleh Leo Suryadinata (1986:191-193). Menurutnya, sekalipun telah meninggalkan identitas dirinya sebagai orang Cina, ke-

mudian mengidentifikasi dirinya sebagai *peranakan*, mereka tetap dianggap sebagai orang Cina. Sebagian besar orang Indonesia belum dapat menerima orang Cina sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Di kalangan para pemimpin bumiputera masih banyak yang memiliki pandangan bahwa sebagai bagian dari nasion Indonesia, orang Cina yang pendatang masih perlu dipertimbangkan ke-Indonesian-nya. Sementara itu Suryadinata juga berpendapat bahwa sekalipun mereka telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, ternyata dalam kehidupan sehari-harinya, mereka masih sukar menyerap simbol-simbol identifikasi nasional Indonesia. Hal itu disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebudayaan negeri leluhur orang Cina sehingga mempersulit terbentuknya identitas diri sebagai bangsa Indonesia.

Sekalipun demikian, dalam penilaian Mely G. Tan (1979:vii), ternyata posisi orang Cina di Indonesia pada dewasa ini, tidak seburuk yang diperkirakan.

"Tidak ada yang bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, malahan biasanya sikap itu bersifat ekstrim, membenci atau sebaliknya menyenangi mereka. Sikap ekstrim ini pun tidak konstan pada orang atau kelompok-kelompok tertentu,

dalam keadaan tertentu bisa disenangi, dalam keadaan lain dibenci. Pendeknya jelas terdapat suatu sikap yang ambivalen terhadap mereka. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang tidak menentu dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, sejak zaman kolonial sampai kini”.

Jelas sikap mendua tersebut bukan hanya dimiliki oleh orang Cina semata, tetapi sikap ambivalen tadi juga dimiliki oleh kalangan bumiputera. Sikap mendua tersebut tidak menguntungkan posisi orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia. Karenanya, agar mereka itu dapat menjadi warga negara Indonesia dalam arti yang sebenarnya, Matchison (1961:29-35) menganjurkan agar mereka yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia mampu membuktikan loyalitas dirinya terhadap negara barunya, baik secara sosial-budaya, politik maupun ekonomik. Kesulitan mereka untuk membuktikan loyalitasnya antara lain terhambat kebanggaan akan kebesaran tradisi dan sistem kemasyarakatan bangsanya yang telah berkembang sejak ribuan tahun silam. Pusat dari dunia ini adalah *'The Middle Kingdom'* dan berbagai bangsa yang berada di luar itu adalah barbar.

Mereka selalu dihindangi oleh pandangan bahwa Cina adalah yang terbaik, dan di luar Cina adalah jelek dan atau lebih rendah. Sekalipun telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, ternyata mereka lebih loyal kepada negeri leluhur dan cenderung mengorganisasikan dirinya dalam ikatan organisasi sosial yang berbau kebudayaan Cina. Karenanya ia melontarkan suatu pertanyaan “..... adakah imigran orang Cina, anak dan cucunya akan dapat menjadi warganegara yang baik dari suatu negeri di mana ia dilahirkan. Akan dapatkah orang Cina di Indonesia menjadi orang Indonesia dalam arti yang sebenarnya, sekalipun secara fisik mereka itu berbeda, demikian pula adat-istiadat dan sistem kemasyarakatannya berlainan?.....”.

Sebagai akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka mendapatkan perlakuan 'diskriminatif'. Untuk mengatasi itu, Somers Heidhues (1974:43) menganjurkan agar orang Cina di Indonesia perlu menyadari bahwa dimilikinya status kewarganegaraan Indonesia, juga harus disertai pula dengan suatu upaya membuktikan *sense of belonging* dan loyalitasnya terhadap 'negara barunya'. Penilaian kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas mereka di

dasari atas prasangka di kalangan bumiputera bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mereka miliki semata-mata dipakai hanya untuk mencari keuntungan di sektor perdagangan. Sebagai warganegara Indonesia, mereka dituntut untuk membuktikan status kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya itu melalui kewajiban formal yang harus diberikan kepada bangsa dan negara. Salah satu cara untuk membuktikannya adalah melalui kesediaan mereka melakukan asimilasi dengan masyarakat di mana ia bertempat tinggal. Jika tidak maka akan muncul penilaian 'sekali Cina tetap Cina'. Ungkapan serupa juga muncul dalam mengkaji komunitas Yahudi, dan bahkan orang Cina diibaratkan sebagai 'Yahudi di Asia Tenggara'. Meskipun orang Yahudi hidup tersebar di berbagai negara, karena kuatnya ikatan perasaan mereka terhadap keluarganya, maka kebudayaan Yahudi amat mewarnai sepek terjang kehidupannya (Epstein, 1978:139). Untuk memahaminya, Milton M. Gordon (1964:145) mengutip ungkapan yang dikemukakan oleh Horace Kallen "*Man may change their clothes, their wife, their religion, their philosophies, to a greater or lesser extent; they cannot change their grandfathers*".

Atas dasar itu, timbul pertanyaan, dapatkah orang Cina dan anak cucu-mereka itu berasimilasi dan menghilangkan ke Cinaannya, sementara di kalangan mereka tetap terdapat berbagai organisasi kepercayaan, kebudayaan dan pendidikan yang terpisah dengan bumiputera (Heidhues, 1974:58). Lon-taran pertanyaan Somers Heidhues tersebut di dasarkan atas fakta yang menunjukkan bahwa berbagai struktur organisasi kemasyarakatan orang Cina di Nanyang bersifat khas. Organisasi satu dengan lainnya, saling memiliki ikatan, baik formal maupun sebaliknya. Biasanya, organisasi tersebut dinilai sebagai pusat kekuatan dan berfungsi untuk mengidentifikasi seseorang. Secara formal, masing-masing organisasi tersebut (seolah-olah) berdiri sendiri tetapi sebenarnya adalah terintegrasi ke dalam suatu sistem yang dikenal luas di Indonesia dengan nama *Kong-Koan*.

Untuk menggambarkan berbagai prasangka dan penilaian tentang mereka, Charles Coppel (1983:54) mengutip sebuah dialog dalam sebuah ceritera bergambar yang diambil dari Mingguan Ujana bulan Mei 1966. Dialog tersebut menggambarkan bagaimanakah sebenarnya posisi hubungan antara Ali (bumiputera) dengan Baba (orang

Cina) dalam kaitannya dengan penilaian kuatnya pengaruh kebudayaan negeri leluhur di kalangan orang Cina.

Ali: Coba Baba pikir, bangsa Ali cukup baik, tapi kenapa masih kurang ajar. Kebebasan yang diberikan sebaliknya Baba selewengkan, akhirnya Baba jadi gendut, Ali jadi kurus.

Baba: Hayaaaaa, ngai janji tobat, tidak bikin lagi.

Ali: Eh janji sih mudah - Baba. Tapi Baba sendiri belum tukar cara hidup. Baba. Pikir Baba !..... Tuh, cara Baba makan di dalam rumah Baba masih berbau Le Le Te Kalau masih pertahankan juga adat leluhur pulang saja Baba ke sana.

Timbulnya sikap seperti itu adalah erat kaitannya dengan komposisi penduduk majemuk. Sekalipun telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Cina dan mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan *peranakan*, mereka tetap dianggap sebagai orang Cina. Mereka belum dapat diterima sepenuhnya sebagai bagian dari nasion Indonesia karena sebagai pendatang, 'ke-Indonesia-an' orang Cina masih perlu dipertimbangkan.

Guna memahami hubungan antara status kewarganegaraan (Republik Indonesia) yang dimiliki dan loyalitas mereka terhadap negara, G.P.Jan (1960:12-14)

mengusulkannya agar mengkaitkannya dengan ajaran Kong Fu Tse. Pada hakekatnya, ajaran Kong Fu Tse amat menekankan rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang tua. Status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang, diibaratkan sebagai sebuah hubungan antara anak dengan orang tua, atau antara rakyat dengan raja. Apabila seseorang kehilangan status kewarganegaraan semula (RRC) berarti terputusnya hubungan antara anak dengan orang tuanya. Apabila seorang anak kehilangan orang tuanya atau sebaliknya, ia akan kehilangan rasa hormat. Dengan kata lain ia akan menjadi anak durhaka terhadap orang tuanya sehingga orang tua akan kehilangan anak atau raja kehilangan rakyatnya. Jika hal ini terjadi, anak atau rakyat tidak akan dapat memenangkan *min hsin* dari orang tua atau raja. Selanjutnya, Jan juga berpendapat bahwa sebenarnya ajaran Kong Fu Tse kurang mendukung emigrasi di kalangan orang Cina. Dalam banyak hal terbukti bahwa apabila mereka terpaksa melakukan emigrasi, maka konsep *chia-tsu* yang tercermin dalam kuatnya ikatan kekeluargaan, amat ditekankan dan merupakan ciri khas kolonisasi orang Cina di daerah perantauan.

Kuatnya pengaruh ajaran

Kong Fu Tse terhadap pembentukan sikap dan perilaku mereka, telah menyebabkan identitas diri mereka terbagi, dan dalam perwujudannya keluar tampak pada sikap yang ambivalen. Menurut penilaian Everett V. Stonequist (1937) bahwa sikap mendua adalah sesuatu hal lazim dikalangan kelompok *marginal*, yaitu sebagai akibat proses kehidupan dalam dua kebudayaan atau dua sistem hubungan sosial. Menurut C. Kerckhoff yang dikutip oleh H.F. Dickie (1969) dikatakan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok *marginal*, biasanya tidak mengidentifikasi dirinya kepada suatu *reference group* tertentu. Pada umumnya mereka selalu dibayang-bayangi oleh rasa tak aman, terlampaui menaruh rasa kasihan kepada dirinya sendiri, dan amat peka perasaannya. Kesemuanya itu lebih disebabkan oleh suatu situasi dan keadaan yang dihadapinya. Mereka tidak nyaman dihadapkan pada suatu kenyataan berada pada lingkungan masyarakat yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda yang daerahnya ia tempati menghendaki agar mereka bersedia berorientasi kepadanya, sementara ia sendiri sebenarnya tidak menginginkan orientasi ke sana. Sebagai akibat-

nya, mereka akan selalu berada pada keraguan, yaitu antara ya dan tidak, serta penuh dengan berbagai pertimbangan yang mungkin akan dapat timbul sebagai akibat sikap dan perilakunya.

Orientasi dan Kompleksitas Orang Cina di Indonesia

Untuk memahami *sense of belonging*, loyalitas dan identitas diri orang Cina perantauan, Wang Gungwu (1981) mengusulkan agar mengkaitkannya dengan (1) kompleksitas permasalahan mereka, dan (2) peristiwa tertentu yang melingkarinya. Dalam hal ini, tidak ada suatu pembagian tunggal yang lebih penting dan dapat berlaku umum. Pada suatu level abstraksi tertentu memang dapat dilakukan generalisasi, misalnya yang menyangkut sikap mereka terhadap RRC maupun Taiwan serta sikap mereka terhadap bumiputera di mana ia bertempat tinggal.

Berdasarkan kerangka hubungan mayoritas-minoritas serta radikalisme politik, Wang Gungwu mengklasifikasikan orang Cina di Asia Tenggara sebagai berikut. Berdasarkan hubungan mayoritas-minoritas, orang Cina perantauan dapat dibagi ke dalam empat kelompok. Pertama, ialah kelompok A yang me-

memiliki orientasi kuat terhadap RRC, baik karena status kewarganegaraan yang dimilikinya maupun karena aktivitas mereka sangat ditentukan oleh status tersebut. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini dapat digolongkan sebagai orang Cina yang chauvinistik. Selain memiliki status kewarganegaraan RRC, ada kemungkinan mereka juga mempunyai status kewarganegaraan Taiwan, dan bahkan tidak segan-segan ada pula yang memiliki status kewarganegaraan suatu negara di mana ia sekarang bertempat tinggal. Jumlah orang Cina yang termasuk dalam kelompok ini adalah cukup besar. Kedua, merupakan orang-orang Cina diklasifikasikan kelompok B. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menerima dan melihat arti penting dari loyalitas terhadap negara di mana ia bertempat tinggal. Akan tetapi demi kepentingan ekonomik, dipandang perlu berlindung pada identitas dirinya sebagai orang Cina yang diwujudkan dalam bentuk menjadi anggota salah satu ikatan keluarga (*tse*) atau organisasi kemasyarakatan yang berbau Cina. Ketiga adalah kelompok C, dan secara politik, yang termasuk dalam kelompok ini cenderung mengidentifikasi dirinya kepada negara di mana ia sekarang bertempat

tinggal. Oleh karena itu mereka cenderung ke arah bumiputera, dan telah mempersiapkan dirinya untuk hidup dan mati di negara yang telah dianggapnya sebagai negeri sendiri. Sekalipun demikian, sebenarnya kelompok ini pun juga terbagi ke dalam beberapa sub kelompok. Banyak di antara mereka ini mendapatkan pendidikan lokal di negara di mana ia bertempat tinggal atau pernah mendapatkan pendidikan pada sekolah 'model kolonial'. Perlu pula diperhatikan bahwa tidak semua orang Cina yang pernah mendapatkan pendidikan lokal dapat dikategorikan kelompok C. Keempat, ialah kelompok D yang terdiri dari orang-orang Cina yang secara menyeluruh telah terasimilasi ke dalam bumiputera. Mengingat asimilasi mereka ke dalam kebudayaan bumiputera demikian mendalam maka dari waktu ke waktu hanya pernah dikenal berasal dari mereka itu berdarah Cina.

Setelah Perang Dunia I, ada kecenderungan timbul perasaan kurang puas di kalangan orang Cina yang tinggal di perantauan, terutama dari kalangan terpelajar. Hal ini sejalan dengan kebangkitan nasionalisme di bawah Sun Yat Sen di negeri Cina dan perlakuan pemerintah jajahan di mana mereka bertempat tinggal. Setelah Perang Du-

nia ke II selesai, negeri Cina terbagi dua (RRC yang Komunis dan Taiwan yang Nasionalis), dan daerah rantau di mana mereka bertempat tinggal, satu demi satu menjadi negara merdeka. Keadaan dan perlakuan dari negara-negara yang ditempatinya yang dinilai merugikan mereka, merupakan alasan utama mereka untuk melibatkan diri dalam gerakan politik radikal.

Dalam konteks derajat radikalisme politik, Wang Gungwu juga mengklasifikasikan orang Cina ke dalam tiga kelompok. Kelompok A adalah yang memiliki derajat radikalisme politik yang tinggi dan bahkan cenderung radikalisme mereka bersifat ekstrim, terutama yang berkaitan dengan identifikasi politik terhadap salah satu negara Cina, RRC atau Taiwan. Jika diamati lebih lanjut, ada kalanya radikalisme politik mereka itu memiliki latar belakang dan tujuan yang saling berbeda. Sebaliknya mereka yang diklasifikasikan ke dalam kelompok C, sekalipun memiliki sikap radikal, tetapi cenderung lebih dipengaruhi oleh suatu idealisme yang terkait langsung dengan kondisi sosial yang diinginkan. Dengan kata lain, Wang Gungwu melihat bahwa radikalisme mereka itu lebih didorong oleh keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya itu loyal ter-

hadap negeri di mana ia tinggal daripada didorong oleh alasan karena ia adalah keturunan Cina. Sebagai keturunan orang Cina yang telah memiliki status kewarganegaraan suatu negara di mana ia bertempat tinggal, berbagai masalah yang diadopsinya ingin dicarikan penyelesaiannya secara radikal.

Jumlah mereka yang termasuk ke dalam klasifikasi kelompok A dan C, sangat kecil. Menurut penilaian Wang Gungwu, sebagian besar orang Cina di Asia Tenggara termasuk yang bertempat tinggal di Indonesia adalah berada pada klasifikasi kelompok B. Loyalitas dari orang-orang Cina dalam kelompok ini lebih tertuju pada komunitas Cina yang telah menjaganya. Siapakah komunitas Cina yang melindunginya, apakah termasuk kelompok radikal atau bukan, umumnya mereka tidak peduli asalkan dapat menjaga dan melindungi kepentingannya. Oleh karena itu tepat kiranya ungkapan penilaian Victor Purcell (1964:462) bahwa untuk memahami loyalitas orang Cina perantauan terhadap negara di mana mereka sekarang bertempat tinggal, perlu dikaitkan dengan makna atau arti yang terkandung ungkapan 'untuk apa memiliki sapi kalau tidak dapat diperah susunya'.

Berbagai upaya mengkla-

sifikasikan loyalitas orang Cina di Indonesia, juga dilakukan oleh Somer (1974:75) dan Coppel (1983), di samping menunjukkan persamaan, kedua dasar pengklasifikasian mereka juga memperlihatkan perbedaan dasar pandangan. Menurut Somers, untuk memahami loyalitas orang Cina di Indonesia, hendaknya dikaitkan pula dengan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang terjadi di masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada awal abad XX, masyarakat Cina di Hindia-Belanda terbagi ke dalam tiga orientasi. Pertama kaum Cina Nasionalis yang diwakili oleh kelompok *Sin Po*, kedua yang berkooperasi dengan pemerintah kolonial yang diwakili oleh kelompok *Chung Hua Hui* dan ketiga adalah kelompok yang diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang bekerjasama dengan kaum nasionalis Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat Cina di Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok, ialah (1) yang berorientasi kepada RRC dan Taiwan, (2) yang berorientasi kepada Belanda dan (3) yang berorientasi ke Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa setelah kemerdekaan RI, orang-orang Cina yang pernah mengalami sekolah Cina di masa pen-

jajahan, cenderung berorientasi kepada RRC atau Taiwan. Sebelum terputusnya hubungan RI-RRC pada tahun 1967, anak-anak mereka cenderung dikirimkan ke berbagai lembaga pendidikan yang terdapat di RRC maupun Taiwan. Sebaliknya mereka yang tetap berorientasi kepada Belanda, adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan sekolah Belanda, baik yang berada di Hindia-Belanda maupun di negeri Belanda. Yang termasuk dalam klasifikasi ini, setelah kemerdekaan cenderung mengirim anak-anak mereka guna melanjutkan pendidikan di negara-negara Ero-Amerika dan setelah menyelesaikan pendidikannya cenderung tetap berada di luar negeri, sementara itu ia tetap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesianya. Akhirnya, orang-orang Cina yang berorientasi kepada Indonesia, sejak masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan, biasanya tidak pernah mempersoalkan lembaga pendidikan milik siapakah yang dimasukinya. Selama revolusi kemerdekaan, mereka aktif membantu perjuangan dan sebagian dari mereka setelah kemerdekaan ada yang bekerja sebagai pegawai negeri. Banyak di antara mereka yang termasuk ke dalam kategori ini, telah menyatakan sebagai warganegara

Indonesia sejak 1946.

Selanjutnya, berdasarkan loyalitas politik, Charles Coppel (1983: 2) mengklasifikasikan orang Cina Indonesia ke dalam tiga kelompok. Pertama adalah mereka yang loyal terhadap pemerintah RRC (komunis), kedua adalah mereka yang loyal kepada pemerintah Taiwan (nasionalis) dan ketiga adalah mereka yang tidak loyal terhadap pemerintah suatu negara mana pun. Kelompok orang Cina yang ketiga ini, tidak peduli apakah menjadi warganegara Indonesia ataukah negara lain asalkan mereka dapat menjalankan usaha mereka, dan dapat menghasilkan keuntungan. Ini berarti, sebenarnya Coppel juga kurang percaya apakah memang ada orang Cina yang loyal terhadap negara di mana ia sekarang bertempat tinggal sekalipun ia telah memiliki status kewarganegaraan negeri tersebut. Pada tahun 1957, Skinner (1973) pernah melakukan penelitian orang Cina *totok* di Indonesia, dan diperoleh gambaran 43 % pro RRC, 28 % agak pro pemerintah RRC, 18 % pro Taiwan, 5 % agak pro pemerintah Taiwan dan ada 6 % bersifat netral dalam pengertian tidak berpihak pada suatu negara mana pun.

Sebagai akibat polemik tentang asimilasi yang berlangsung sejak 13 Februari sampai dengan

25 Juni 1960, muncul pula tiga klasifikasi kelompok orang Cina di Indonesia. Pertama adalah kelompok yang tidak percaya kalau masalah kaum Cina *peranakan* akan dapat diselesaikan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah mereka yang menolak status kewarganegaraan Indonesia pada periode 1950-1951. Mereka lebih suka memilih menjadi warganegara RRC daripada Indonesia. Kedua, adalah kelompok yang percaya bahwa masalah kaum *peranakan* Cina akan dapat diselesaikan secepatnya dan memuaskan. Banyak di antara mereka yang termasuk dalam kelompok ini menyatakan penolakannya menjadi warganegara RRC dan memilih kewarganegaraan Indonesia. Banyak di antara mereka yang termasuk kategori kedua ini, telah menjadi warganegara Indonesia sejak dilaksanakannya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Ketiga, adalah kelompok orang Cina seperti yang terdapat pada kategori kedua tetapi berpandangan bahwa pemecahan masalah kaum *peranakan* tidak mungkin diselesaikan secara cepat dan akan memakan waktu yang cukup lama. Mereka menyadari bahwa pemecahan atas permasalahan ini terkait dengan berbagai hal.

Asimilasi dan Integrasi Nasional di Indonesia

Jika berbagai pandangan tersebut di atas lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah keturunan orang Cina di Indonesia, perlu ditempuh jalan mengkaitkannya dengan masalah pembangunan watak bangsa. Hal itu sejalan dengan adanya penilaian bahwa kuatnya orientasi dan identifikasi diri orang Cina terhadap negeri leluhur sehingga m menyebabkan kurangnya *sense of belonging*, loyalitas dan solidaritas sebagai bangsa Indonesia terhadap negara Indonesia.

Disadari adalah memang benar bahwa loyalitas dan orientasi seseorang terhadap sebuah negara, tidak hanya semata-mata ditentukan oleh status kewarganegaraan mereka. Status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah erat kaitannya dengan hubungan seseorang dalam konteks hukum dari suatu negara. Dengan dimilikinya status kewarganegaraan dari suatu negara, maka seseorang itu akan mendapatkan perlakuan timbal-balik. Di satu pihak ia harus setia kepada negara dan sementara itu di pihak lain negarapun harus bertanggung jawab dan melindungi warganegaranya (Jan, 1969:98-100). Dalam kenyataannya, cerminan sikap nasionalisme sese-

orang itu adalah amat kompleks. Mengingat hal itu maka status kewarganegaraan tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya indikator sikap nasionalisme, melainkan hanya lebih merupakan 'pengakuan terhadap status politik seseorang dalam suatu negara, atau orang tersebut dianggap sah oleh negara bahwasanya yang bersangkutan adalah warga dari suatu negara yang berdaulat'.

Sejak lama telah dilakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan *sense of belonging*, loyalitas dan solidaritas sebagai bangsa Indonesia, namun berbagai hambatan telah muncul. Salah satu peristiwa penting dalam mengupayakan pembentukan watak bangsa di kalangan orang-orang Cina di Indonesia yang telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, dimulai tatkala seorang Menteri pada 1 Maret 1960 menganjurkan " agar Peranakan sedikit demi sedikit meninggalkan usaha yang bersifat eksklusif sehingga memudahkan tertjapainya asimilasi kulturil, ekonomis dan bahkan biologis, satu sama lain untuk mengurangi jarak pemisah (*psychologishe barriere*) antara mayoritas dan minoritas". Anjuran tadi mendapatkan sambutan dari sepuluh orang peranakan melalui *Statement* Asimilasi yang dikeluarkan

pada 24 Maret 1960, antara lain memuat pandangan mereka yang mengatakan bahwa " masalah minoriteit hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi dalam segala lapangan secara aktif dan bebas". Sementara itu, Ketua Umum BAPERKI pada tanggal 31 Maret 1960 mengeluarkan *statement* yang isinya bertentangan dengan pendapat sepuluh pemuda Peranakan tersebut, antara lain mengatakan bahwa " cara penyelesaian golongan kecil dengan jalan asimilasi dan sebagainya adalah terang tidak bijaksana, tidak demokratis dan melanggar hak-hak azasi manusia serta pasti tidak dapat dilaksanakan ".

Sebagai akibat munculnya dua pandangan dari kalangan masyarakat Cina, timbullah polemik asimilasi yang dimuat dalam mingguan *Star Weekly*. Polemik tersebut terjadi di kalangan mereka yang mendukung pandangan Ketua Umum BAPERKI (lazim dikenal dengan sebutan aliran integrasi) dan pendukung pandangan sepuluh orang pemuda Peranakan yang dikenal dengan aliran asimilasi. Akhirnya, mereka yang mendukung aliran asimilasi menyelenggarakan seminar di Bandung Ambarawa pada tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 1961. Dikatakan bahwa asi-

milasi bagi orang Cina adalah konsekwensi yang mendasar dan logis dari pemberian dan penerimaan status kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada orang Cina adalah sekaligus juga dimaksudkan untuk mempermudah proses asimilasi dengan seluruh rakyat Indonesia.

Park dan Burgess (1921:736-737) mengatakan bahwa asimilasi merupakan produk akhir yang sempurna dari suatu kontak sosial, dan pada bagian lain tulisannya, Park (1957) memberikan istilah konsepnya sebagai 'asimilasi sosial', yaitu " proses atau proses-proses yang terjadi apabila dua kelompok yang berbeda ras dan kebudayaan, bertempat tinggal di suatu wilayah yang sama, memiliki sejumlah solidaritas budaya yang cukup untuk mendukung terciptanya eksistensi nasional". Sebagai contoh, para migran di Amerika dianggap telah berasimilasi apabila mereka itu sepatunya dapat mempergunakan bahasa Inggris dan ikut berperan serta dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan politik tanpa adanya suatu prasangka. Ini berarti bahwa dalam suatu asimilasi mengharuskan para migran untuk menyesuaikan dirinya pada kelompok kebudayaan yang didatangi (*host society*).

Louis Wirth (1945) mengatakan bahwa kebijakan asimilasionis cenderung lebih menekankan agar para warga minoritas di suatu negara bergabung ke dalam masyarakat lebih luas dengan cara melarang kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok dominan atau superordinat. Sebaliknya pada aliran yang dianut oleh kaum pluralis, kelompok dominan seyogyanya lebih bersikap toleran terhadap kebudayaan kelompok subordinat. Dengan kata lain, golongan minoritas tetap diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Atas dasar itu maka untuk mewujudkan asimilasi dalam rangka suatu integrasi nasional, terdapat dua aliran pemikiran, yaitu apakah asimilasionis ataukah pluralis. Kesemuanya itu tidak terlepas dari perkembangan peristiwa yang terjadi di berbagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku-bangsa dan golongan. Melalui berbagai kajian tentang asimilasi, ternyata dalam implementasinya berkaitan erat dengan suatu kebijakan yang ditempuh oleh negara, terutama guna menemukan pola-pola ideal untuk mempersatukan keanekaragaman tersebut dalam suatu wadah negara bangsa.

Disadari bahwa untuk menerapkan model yang manakah akan dipilih, kedua-duanya akan menimbulkan pertanyaan. Sejauh manakah kelompok superordinat mampu melaksanakan dan memperkenankan kelompok subordinat melakukan hal tersebut. Apakah kelompok superordinat begitu saja percaya bahwa golongan minoritas akan berasimilasi ataukah mereka akan tetap mempertahankan kebudayaan mereka. Apakah kelompok dominan dapat menerima kemungkinan berbagai hal kontradiktif yang akan dilakukan oleh kelompok subordinat. Jika berbagai hal tadi dapat diterima, maka suatu integrasi nasional akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya jika tidak maka akan timbul konflik, baik secara terbuka maupun yang bersifat *latent*.

Untuk memilih aliran yang manakah akan dipilih, ada sebuah model hipotetis, yaitu yang bersifat sentripetal dan sentrifugal. Suatu inklinasi yang bersifat sentripetal, kelompok subordinat diharuskan menerima sistem nilai dan gaya hidup yang lazim berlaku di masyarakat. Jika hal tersebut dapat diupayakan maka akan semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam berbagai kelompok perkumpulan dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, suatu inklinasi yang bersifat sen-

trifugal adalah apabila ada keinginan di kalangan subordinat untuk memisahkan diri dari kelompok dominan atau dari berbagai ikatan yang ada di masyarakat. Secara kultural, biasanya hal itu lazim terjadi karena kelompok subordinat sering dan masih tetap ingin menjaga berbagai tradisi, sistem nilai, bahasa, agama, pola-pola rekreasi mereka, dan lain sebagainya. Untuk melindungi berbagai hal tersebut, ada kebiasaan kelompok subordinat melakukan endogami atau mendirikan perkumpulan yang terpisah atau eksklusif, dan bahkan mereka ini lebih memusatkan dirinya pada suatu lapangan pekerjaan tertentu yang eksklusif terhadap *out-group*.

Penutup

Sebagai ciptaan dan warisan hidup bermasyarakat, serta melalui perjalanan sejarah, aneka-warna suku-bangsa di Nusantara, menjelma menjadi bangsa Indonesia. Sementara itu sebuah negara modern (*nation state*), bukan hanya terwujudkan dalam sebuah unit geopolitik semata, tetapi juga mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem sosial-budaya yang berasal dari aneka-warna suku-bangsa (*sub national culture*). Karenanya berbagai pola fragmentasi, baik berdasarkan kesuku-bangsaan, agama, orientasi politik, dan sebagainya, perlu dicermati agar tidak menuju disintegrasi.

Mengingat keanekaragaman

Paradigma Orientasi Sentripetal (Sp) dan Sentrifugal (Sf)

| | | | |
|--------------|---|--|-----------------------------|
| | A | B | |
| Superordinat | Sp | Sf | |
| | | | Cenderung ke arah integrasi |
| Subordinat | Sp | Sf | |
| | <i>Assimilation</i> <i>Incorporation</i> | <i>Cultural</i> <i>Autonomy</i> | |
| | C | D | |
| Superordinat | Sf | Sp | |
| | | | Cenderung ke arah konflik |
| Subordinat | Sp | Sf | |
| | <i>Forced segregation</i> <i>with resistance</i> | <i>Forced assimilation</i> <i>with resistance</i> | |

suku-bangsa dan kebudayaan di Indonesia maka kebangsaan Indonesia seharusnya harus dipandang sebagai proses pencarian suatu bentuk kehidupan bersama yang ideal, dan tidak hanya didasari oleh semangat persatuan dan kesatuan semata. Akhirnya, di tengah-tengah berbagai tarikan sentrifugal dan supranasionalisme, maka untuk menjaga eksistensi suatu negara bangsa maka suatu integrasi nasional yang diupayakan harus memperhatikan aspek psikologis, antara lain berkaitan dengan tingkat kepuasan tertentu dari suatu suku-bangsa atau golongan yang terlibat proses tersebut. Karena itu yang perlu dicermati bentuk suatu integrasi nasional yang dihasilkan, apakah melalui suatu *agreement* (permutakatan) ataukah karena kesesuaian *congruence* sehingga tercipta suasana yang harmonis, terutama hal itu dihasilkan melalui kebijakan yang bersifat sentripetal ataukah sentrifugal. Apabila terjadi *disagreement* atau *discrepancy* (ketidakcocokan), maka berarti kelompok superordinatlah yang menang atas kebijakan yang bersifat sentripetal, karena kelompok subordinat lebih menghendaki yang bersifat sentrifugal. Apabila hal ini yang terjadi maka akan timbul konflik yang dapat menyebar luas.

Daftar Pustaka

- Chang Tsen-Kung, 1954, *Historical in the Geography of Chinese Settlement Malay Archipelago*, Dissertasi Ph.D., Universitas Nebraska, University Microfilms.
- Copel, Charles A., 1983, *Indonesian Chinese in Crisis*, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
- Dickie, H.F., 1969, "A Status Ambiguity: The Marginal Situation" dalam *Special Problems in a Changing World: A Comparative Reader*, Wilter M.Gerson (ed.), New York, Thomas Y.Crowell Company, Hlm.13-23.
- Geertz, Clifford, 1965, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in the New States", *Old Societies and New States*, C.Geertz (ed.), New York, The Free Press, Hlm.105-107.
- Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York, Basic Books Inc..
- Horowitz, Donald L., 1976, "Ethnic Identity", dalam *Ethnicity: Theory and Experience*, Glazer, Nathan dan Daniel P.Moynihan (ed), Massachusetts, Harvard University Press, Hlm. 111-140.
- Heidhues, Somers Mary F., 1974, *Southeast Asia's Chi-*

- nese Minorities, Australia, Longman.
- Jan, George P., 1960, *Nationality and Treatment of Overseas Chinese in Southeast Asia*, Disertasi Ph.D, Faculty Art and Science University of Michigan, New York, University Microfilm.
- Koentjaraningrat (ed.), 1982, *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Jakarta, LP3ES.
- Liddle, William R., 1970, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, New Haven, Yale University Press.
- Martin, James G and Clyde W.Franklin, 1973, *Minority Group Relations*, Ohio, Charles E. Merrill Publishing Company
- Michell, J.C., 1974, "Perceptions of Ethnicity and Ethnic Behavior: An Emperical Exploration", dalam *Urban Ethnicity*,
- Cohen, Abner (ed.), Tavistock Publications, London-New York, Hlm.1-36.
- Lie Tek Tjeng, 1971, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*. Jakarta, LRKN-LIPI.
- Mitchison, Lois, 1961, *The Overseas Chinese: A Backgroun Book*, London, The Badley Head.
- Ong Hok Ham, *Rakyat dan Negara*, 1983, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan.
- Poerwanto, Hari, 1973, *Golongan Minoritas Cina di Kecamatan Kota Blora: Suatu Penelitian Mengenai Masalah Akomodasi Pada Tahun 1972*, Yogyakarta, Skripsi Sarjana Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Poerwanto, Hari, 1990, *Orang Khek di Singkawang: Suatu Kajian Mengenai Masalah Asimilasi Orang Cina Dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia*, Jakarta, Disertasi Doktor pada Universitas Indonesia.
- Purcell, Victor, 1964, *The Chinese in Southeast Asia*, London, Oxford University Press.
- Schermerhorn, R.A., 1970, *Comparative Ethnic Relations: A Framework of Theory and Research*, New York, Random House.
- Simpson, George E. dan J.Milton Yinger, 1972, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, New York, Harper and Row Publisher.
- Skinner, G.William, 1973, "Change and Persistence in Chinese Culture Overseas: A Comparison of Thailand and Java". *Southeast Asia: The Politics of National Integration*, John T.McAlister

- (ed.), New York, Random House, Hlm.399-416.
- Stonequist, Everett V., 1937, *The Marginal Man: A Study in Personality and Cultural Conflict*, New York, Charles Scribner's Sons.
- Suryadinata, Leo, 1978, *The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers*, Singapore, Chapman Enterprise.
- Suryadinata, Leo, 1984, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarta, Grafiti Press.
- Suryadinata, Leo, 1986, *Pribumi Indonesians: The Chinese Minority and China*, Singapore, Hernemann Asia.
- Tan, Mely G. (ed.), 1979, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta, PT Gramedia.
- Vasanty, Puspa, 1971, "Kebudayaan Orang Tjina di Indonesia", *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Koentjaraningrat (ed.), Jakarta, Jambatan, Hlm.351-370.
- Wang, Gungwu, 1981, *Community and Nation Essays on Southeast Asia and The Chinese*, Singapore, Southeast Asia Publication Series.
- Weldon, Peter, 1974, "Indonesian and Chinese Status and Language Difference in Urban Java", *Journal of Southeast Asian Studies*, (V/1), Singapore, McGraw-Hill Far Eastern Publisher Ltd., Hlm.37-54.
- Williams, Lea E., 1960, *Overseas Chinese Nationalism: The Genesis of the Pan Chinese Movement in Indonesia 1900-1916*, Glencoe-Illinois, Free Press.
- Willmott, Donald E., 1960, *The Chinese of Semarang; A Changing Minority in Indonesia*, Ithaca-New York, Cornell University Press.
- Willmott, Donald E., 1961, *The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958*, Modern Indonesia Project, Ithaca-New York, Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies, Cornell University.
- Wirth, Louis, 1945, "The Problem of Minority Groups", *The Science of Man in the World Crisis*, R.Linton (ed.), New York, Columbia University Press, Hlm.347-372.
- Yayasan Tunas Bangsa, 1977, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, Jakarta, PT Gramedia.